

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan perspektif gender dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peran perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dengan terlibat aktif dalam memperkuat ekonomi rumah tangga. Meningkatnya pendidikan dan kapasitas yang mereka miliki selain untuk membantu kondisi ekonomi keluarga juga bisa sebagai bentuk keinginan untuk mandiri secara finansial dan meningkatkan status sosial ekonomi. Menurut Elfindri & Bachtiar (2004) pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam membentuk kemandirian kaum perempuan dan mengurangi hambatan-hambatan psikologis baik internal maupun eksternal yang mereka hadapi dalam berkarir. Salah satu dampak dari pembangunan tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja tidak hanya secara nasional, namun juga di daerah Sumatera Barat. Dalam periode tahun 2013 – 2016, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Sumatera Barat mengalami kenaikan yang cukup besar yakni 5,85 persen dari sebesar 47,63 persen tahun 2013 menjadi 53,48 persen pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Peningkatan partisipasi kerja wanita tersebut tentunya berdampak positif antara lain dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun seiring dengan itu juga bisa menimbulkan berbagai problematika terkait dengan sumber daya ekonomi serta perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat seperti ketidakstabilan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Peningkatan pendapatan, kemandirian dan pendidikan yang diperoleh perempuan serta adanya perubahan institusi masyarakat berkaitan erat dengan meningkatnya perceraian (Becker, 1981). Partisipasi kerja wanita bisa berpengaruh terhadap ketidakstabilan perkawinan.

Secara empiris dua kejadian tersebut yaitu partisipasi kerja wanita dan perceraian disebutkan saling berhubungan satu sama lain. Kenaikan partisipasi kerja wanita sering dilihat sebagai salah satu sebab meningkatnya tingkat

perceraian (Becker, 1981; Tzeng & Mare, 1995; Schoen, Astone, Rothert, Standish, & Young J, 2002). Hubungan tersebut menjadi beralasan melihat fenomena yang ada di Sumatera Barat, pada periode tahun yang sama yaitu 2013 – 2016 selain kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita juga terjadi peningkatan kasus perceraian dimana pada tahun 2013 terjadi 4.173 kasus cerai gugat atau 67,6 persen dari total 6.041 kasus perceraian dan terus meningkat sehingga pada tahun 2016 terdapat 5.193 kasus cerai gugat atau 71,5 persen dari 7.262 total kasus perceraian (Badan Pusat Statistik, 2017). Kondisi perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya ini terlihat mengkhawatirkan karena mengindikasikan rapuhnya institusi keluarga sehingga menjadi salah satu masalah yang dihadapi dan tidak bisa diabaikan di Sumatera Barat.

Tingginya jumlah kasus perceraian perlu menjadi perhatian dikarenakan cenderung berdampak negatif terhadap individu, masyarakat bahkan negara. Menurut Fukuyama (2000) kasus perceraian merupakan patologi sosial yang menjadi salah satu tanda kemerosotan moral karena individualisme yang berlebihan dan menurunnya modal sosial yang meruntuhkan keluarga sehingga peningkatannya pada waktu tertentu dapat mengakibatkan *guncangan besar* di suatu daerah seperti yang terjadi di sebagian besar negara barat setelah tahun 1965. Runtuhnya keluarga inti akibat perceraian yang terus meningkat menurutnya berkaitan dengan peningkatan kemiskinan bagi masyarakat kelas bawah dalam hierarki sosial dengan meningkatnya tingkat kejahatan dan berpengaruh terhadap merosotnya kualitas sumberdaya manusia pada generasi-generasi berikutnya. Rusaknya struktur keluarga sangat berkaitan dengan timbulnya penyakit-penyakit sosial dan kriminalitas seperti penggunaan narkoba, LGBT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, seks bebas serta pelacuran yang nantinya akan menjadi beban ekonomi bagi negara untuk menanggulangnya. Selain itu perceraian juga bisa menurunkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Perempuan dan anak yang paling dirugikan akibat perceraian salah satunya karena menurunnya kondisi sosial ekonomi perempuan/istri dan anak dibandingkan dengan laki-laki/suami karena berkurangnya sumber pendapatan. Menurut penelitian di Amerika, perceraian dapat menyebabkan terjadinya penurunan penghasilan sebesar 30-70 persen pada tahun pertama

setelah perceraian (Hoffman & Duncan, 1988). Para peneliti sepakat perceraian bisa menyebabkan timbulnya banyak masalah yang disebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti menurunnya kualitas tempat tinggal, stress karena kesulitan ekonomi dan anak-anak korban perceraian rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis dari orangtua tiri dan resiko ditelantarkannya mereka oleh orang tua tunggal. Efek yang ditimbulkan akibat menurunnya kesejahteraan keluarga ini apabila terjadi dalam jumlah yang terus meningkat tentunya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya kesejahteraan bangsa karena ekonomi keluarga merupakan basis dari ekonomi nasional.

Penyebab perceraian sangatlah kompleks dan bisa berbeda-beda untuk setiap individu, pasangan, daerah bahkan negara sekalipun. Terjadinya kasus perceraian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung (Amato & Rogers, 1997). Faktor langsung berhubungan dengan masalah rumah tangga berdasarkan pengalaman langsung individu bercerai seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan alkohol dan narkoba, pertengkaran dan lain sebagainya. Sedangkan faktor tidak langsung berkaitan dengan variabel ekonomi, sosio-demografi dan peristiwa hidup antara lain pekerjaan, pendapatan, usia nikah pertama, tingkat pendidikan, status sosial, ras, agama, usia perkawinan, perceraian orang tua dan sebagainya. Faktor pekerjaan terutama bagi wanita dapat membuat posisi mereka menjadi mandiri secara ekonomi, pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang juga bisa mempengaruhi kestabilan rumah tangganya.

Berbagai argumentasi disebutkan menjadi penyebab yang berpengaruh kuat terhadap perceraian wanita bekerja. Salah satu argumentasi adalah ekonomi berdasarkan teori perceraian Becker. Perceraian dapat ditinjau dari perspektif ekonomi yaitu partisipasi kerja wanita kawin akan menurunkan keuntungan dari spesialisasi kerja berdasarkan gender, mengurangi nilai waktu dalam aktifitas rumah tangga dan pengasuhan anak yang kemudian dapat menurunkan permintaan terhadap anak sehingga keuntungan perkawinan semakin berkurang dan meningkatkan kecendrungan untuk bercerai (Becker, 1981). Bagi wanita bekerja pendapatan dan jam kerja memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap

resiko konflik rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian (Kalmijn & Poortman, 2006). Beberapa peneliti menemukan resiko perceraian wanita bekerja dipengaruhi oleh kemandirian secara ekonomi yang terkait dengan partisipasi kerja dan karakteristik pekerjaan seperti upah/pendapatan dan jam kerja disamping variabel demografi dan sosio-ekonomi individu seperti pendidikan, anak, usia nikah pertama, lama perkawinan, perceraian orang tua, hidup bersama tanpa ikatan, ras, etnis dan lain-lain (Sayer & Bianchi, 2000). Pendidikan yang semakin tinggi, kemandirian ekonomi istri dalam hal ini meningkatnya pendapatan atau karir bahkan lingkungan kerja juga disebut berpotensi memicu terjadinya konflik rumahtangga. Pendapatan dan tingkat pendidikan yang tinggi berpengaruh meningkatkan resiko perceraian (Becker, 1981). Sementara studi lain menemukan resiko perceraian dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi akibat dari pendapatan dan pendidikan yang rendah (Hoffman & Duncan, 1995). Meskipun temuan studi memperlihatkan hasil yang berbeda-beda, faktor sosioekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menjelaskan probabilitas perceraian wanita bekerja. Faktor yang dimiliki oleh wanita bekerja membuat mereka lebih cenderung bercerai daripada mereka yang tidak bekerja seperti pendapatan, jam kerja, lapangan usaha dan status pekerjaan sehingga wanita bekerja memiliki resiko cerai lebih besar dari mereka yang tidak bekerja.

Dalam ikatan perkawinan tentunya perempuan juga memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga karena mereka juga yang biasanya terkena dampak baik secara ekonomi maupun sosial jika terjadi perceraian, namun berdasarkan fenomena dan data yang ada pihak istrilah yang banyak menggugat cerai suaminya. Ungkapan *Indonesia Darurat Cerai* tidak berlebihan untuk menggambarkan kenaikan angka perceraian yang mencapai 16 - 20 persen dari tahun 2009 – 2016, trend perceraian terus meningkat setiap tahunnya secara nasional yang mengindikasikan rapuhnya institusi keluarga dan sangat mengejutkan lebih dari 70 persen penggugat cerai adalah perempuan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Indonesia, 2016). Ironisnya, kecenderungan peningkatan gugat cerai juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat, daerah yang sangat peduli dengan kaum perempuan terkait dengan budaya



matrilinial yang dianut mayoritas masyarakat. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2017) jumlah kasus perceraian terus meningkat mulai dari tahun 2012 – 2016 dimana dalam kurun waktu tersebut kasus perceraian dan dominasi cerai gugat istri dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016. Permasalahan ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius berkaitan dengan peran pemerintah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

Meningkatnya jumlah wanita bekerja yang disebut rentan terhadap ketidakstabilan rumahtangga, tingginya tingkat perceraian didominasi oleh cerai gugat di Sumatera Barat yang bisa berdampak negatif menarik untuk diteliti dari karakteristik wanitanya. Hal inilah yang menjadi alasan penelitian ini melihat dari sisi perempuan dengan menguji hipotesis pengaruh faktor sosioekonomi yakni pendapatan, jam kerja, jumlah anak, tingkat pendidikan, lapangan usaha dan status pekerjaan terhadap resiko perceraian wanita bekerja di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya urgensi masalah perceraian dan ruang untuk mengkaji faktor yang mempengaruhinya tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan suatu kajian dengan judul **Analisis Ekonomi Perceraian Wanita Bekerja di Sumatera Barat**.

## **B. Rumusan Masalah**

Provinsi Sumatera Barat memiliki kenaikan yang cukup besar dalam tingkat partisipasi kerja wanita dalam beberapa tahun terakhir seiring juga dengan meningkatnya dominasi cerai gugat oleh istri. Badan Pusat Statistik, (2017) merilis 40,33 persen dari total angkatan kerja di Sumatera Barat adalah perempuan dan 55,7 persen dari mereka memiliki jam kerja diatas 35 jam per minggu. Bagi pekerja wanita kawin faktor ekonomi yakni pendapatan dan jam kerja memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap resiko konflik rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian (Kalmijn & Poortman, 2006).

Melihat data yang ada, angka perceraian di Provinsi Sumatera Barat termasuk tinggi, melebihi rata-rata nasional sebesar 10 persen. Secara nasional tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 berada di peringkat kedua dengan angka perceraian sebesar 17,28 persen dari 42.015 peristiwa nikah dan 7.262 kasus perceraian, dimana 71,5 persen atau 5.193 dari total kasus

perceraian tersebut merupakan cerai gugat oleh istri yang disebabkan antara lain oleh masalah ekonomi, ketidakharmonisan, tidak adanya tanggungjawab dan kekerasan fisik maupun psikis (Badan Pusat Statistik, 2017). Hal tersebut menunjukkan sesuatu yang ironis bahwa perkara dominasi cerai gugat seperti ini telah menjadi trend baru dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini juga memperlihatkan resiko perceraian tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi.

Tingginya kasus perceraian ini tentunya tidak menguntungkan untuk kesejahteraan ekonomi keluarga dan bisa menjadi beban ekonomi bagi pemerintah. Perceraian dapat menurunkan tingkat kesejahteraan terutama karena berkurangnya penghasilan keluarga yang berasal dari pendapatan suami yang bias berujung pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Meningkatnya perceraian biasanya diikuti oleh fenomena peningkatan jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan orangtua tunggal. Rilis Badan Pusat Statistik (2016) menunjukkan Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat tertinggi se-Sumatera dan ke 5 tertinggi di Indonesia dalam persentase jumlah wanita cerai hidup dengan angka 3,31 persen berada diatas rata rata nasional sebesar 2,69 persen. Persentase penduduk perempuan dengan status cerai hidup sebesar 3,02 persen untuk daerah perkotaan sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar 3,54 persen.

Sebagai salah satu provinsi yang mengalami masalah dengan tingginya tingkat perceraian dan dominasi cerai gugat oleh istri yang diduga merupakan wanita bekerja, diperlukan telaah dan analisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama dilihat dari sisi wanita yang mengalaminya. Upaya untuk mengurangi kasus perceraian juga dibutuhkan agar peningkatan kualitas hidup manusia yang dimulai dari keutuhan keluarga menuju keluarga yang sejahtera dapat di realisasikan dengan maksimal sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang pembangunan keluarga sejahtera.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana kondisi umum perceraian wanita bekerja di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian wanita bekerja di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perceraian wanita bekerja di Provinsi Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa karakteristik perceraian wanita bekerja di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis hubungan dan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian wanita bekerja di Sumatera Barat tahun 2016.
3. Memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk mengurangi cerai gugat di Provinsi Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menjadi salah satu kajian yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian wanita bekerja di Sumatera Barat.
2. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melihat kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan dalam melihat resiko perceraian wanita bekerja.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan alternatif bagi para pengambil keputusan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya dalam menentukan kebijakan antisipatif mengurangi perceraian.

Selanjutnya manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai perluasan dan pengembangan terkait dengan ilmu ekonomi keluarga terutama pada aspek perceraian wanita bekerja.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menganalisa resiko perceraian individu wanita bekerja yang berstatus kawin dan cerai hidup di Provinsi Sumatera Barat serta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Karena keterbatasan data Susenas yang digunakan dalam penelitian ini, maka permasalahan yang diidentifikasi terbatas pada faktor sosial ekonomi dan sosial demografi yaitu pendapatan, jam kerja, tingkat pendidikan, jumlah anak, lapangan usaha/sektor pekerjaan dan status pekerjaan individu wanita bekerja. Adapun faktor dari sisi suami dan faktor masalah perkawinan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain – lain tidak dibahas dalam studi ini dikarenakan keterbatasan data yang tersedia.

Objek penelitian ini meliputi seluruh wanita bekerja di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan sampel individu berdasarkan data Susenas Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 didukung dengan data publikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini maka sistematika penulisan di susun sebagai berikut:

**BAB I** : Bab Pendahuluan; berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Bab Tinjauan Literatur; berisi landasan teoritis dan konsep, penelitian terdahulu, pemilihan variabel penelitian, kerangka analisa dan hipotesis penelitian.



BAB III : Bab Metode Penelitian; berisi penjelasan mengenai daerah penelitian, jenis dan sumber data, seleksi data penelitian, metode analisa data dan definisi operasional variabel.

BAB IV : Bab Gambaran Umum Daerah Penelitian; berisi gambaran tentang objek dan lokasi penelitian.

BAB V : Bab Hasil dan Pembahasan; berisi tentang temuan empiris hasil analisis data dan analisa permasalahan penelitian. serta implikasi kebijakan yang dihasilkan dari analisa penelitian.

BAB VI : Bab Kesimpulan dan Saran; berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran.

